

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Rai Dwi Andayani W (2019) meneliti yang bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan pengukuran *value for money* pada kabupaten badung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Data yang digunakan adalah data skunder yaitu metode data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dan variabel yang digunakan adalah *value for money* Hasil penelitian ini Ditinjau dari rasio ekonomis, efisiensi, efektivitas, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Kabupaten Badung tahun 2018 telah mampu menjalankan pekerjaan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Harry Saputra Liando (2018), dalam penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangie menggunakan metode *value for money*. Hasil Penelitian ini Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangie dari segi ekonomis disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangie dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisien harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi, dari segi efektivitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wuwungan (2019) meneliti di Kota Manado menggunakan metode *value for money*, ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil wawancara dan dengan data yang terkumpul dianalisis dan kesimpulan dikumpulkan. Hasil penelitian diperoleh dari hasil penelitian Dinas Kesehatan Kota Manado diperoleh metode *value for money* untuk pengukuran ekonomis dan efisiensi, mencapai hasil yang baik.

Yulitiawati & Rusmidarti (2021) mengetahui pengukuran kinerja organisasi sektor publik menggunakan pendekatan *value for money* di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis kriteria ekonomis menunjukkan kategori 90-100% yang berarti bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah, kriteria efisiensi tergolong kurang efisien yaitu hasil perhitungannya lebih dari 90%, sedangkan kriteria efektif telah terealisasi secara optimal karena hasil perhitungan rasio antara 100%

C. Susi Maryanti (2021), dalam penelitian berjudul Evaluasi *value for money* untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019. Dalam Penelitian ini dilakukan untuk mengukur Tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari situs website pemerintah kota Surabaya. Hasil penelitian ini adalah pemerintah kota Surabaya ekonomis, tidak efisien, namun Tingkat efektivitas bisa dikatakan sangat efektif.

Mulyanigtyas (2018) menganalisis kinerja keuangan kota Mojokerto dengan pendekatan *value for money*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada BPPKA kota Mojokerto tahun anggaran 2013-2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penilaian kinerja keuangan yaitu cukup ekonomis, kurang efisien, dan sangat efektif.

Anita Daun Lamba (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data primer. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala BPKAD, Sekretariat, Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, Bagian Barang Milik Daerah dan Bagian Akuntansi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan

pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *value for money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nurhasanah, Aliatul (2017) melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2012-2015 yang ditinjau dari rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan sumber data yang diteliti adalah data Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD dan APBD) Kabupaten Malang tahun 2012-2015. Teknik analisis data yang diterapkan berdasarkan metode *value for money* yaitu melakukan pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari rasio ekonomis dapat diketahui pada tahun 2012-2015 kinerja pemerintahan dalam melakukan penghematan biaya sudah berhasil atau baik yaitu dengan adanya sisa dana.

Sri Latifah (2020) melakukan Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan konsep *value for money* yang meliputi rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Objek pada penelitian ini adalah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang menggunakan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pajak daerah yang diukur menggunakan rasio ekonomis berada pada kategori ekonomis, pada rasio efisiensi berada pada kategori efisien. Pada hasil rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pajak daerah belum efektif.

## **B. Landasan teori**

### **1. Pengertian Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Mahsun (2016:25). Menurut Bastian, Indra. (2006:274), bahwa kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin di capai terutama dalam perumusan skema strategis (strategis planning) suatu organisasi. Sementara Menurut Ulum (2008:182), menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan. Ukuran kinerja membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Keuangan Kinerja adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan adalah hasil yang dimiliki secara produktif dan memonitoring efisiensi penggunaan modal perusahaan dalam bentuk dana maupun barang modal untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Mardiasmo, (2018:122) Kinerja keuangan bertujuan:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk pencapaian ujuan yang sama (*goal congruence*).
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Bastian, Indra. (2006:330) selain memiliki tujuan, pengukuran kinerja juga memiliki manfaat, yaitu:

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
- b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksana.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
- e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
- j. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

## 2. *Value For Money*

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for money* merupakan sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berarti pemerolehan *input* dengan

kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Dari ketiga elemen pokok *value for money* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Mardiasmo, (2018:4). Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan berarti bahwa semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Pemerataan atau kesetaraan berarti pemerintah harus menerapkan pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

*Value for money* menurut Mardiasmo (2018:130) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input* value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

## 1. Ekonomis

Mahmudi (2018: 21) Ekonomis adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh *input* dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja Rasio Ekonomis: sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau untuk memperoleh sesuatu. Mahmudi (2018: 21) Untuk menghitung tingkat ekonomis pendapatan, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{input value}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input*: Realisasi Anggaran Belanja *Input*

Value: Target Anggaran Belanja

Kriteria Ekonomis menurut Mahmudi (2018: 21)

- a. jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti Ekonomis.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti Ekonomis berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak Ekonomis.

Mahsun (2016:179) menyatakan bahwa ekonomis berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak, agar diperoleh hasil yang baik. Rasio ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya

## 2. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Bastian, indra, (2006: 280).

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditetapkan. Mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. *Outputnya* adalah realisasi biaya perolehan pendapatan daerah dan *inputnya* adalah realisasi pendapatan daerah. Untuk menghitung efisiensi pendapatan digunakan rumus berikut. Halim, (2002:130):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Output*: Realisasi Anggaran Belanja

*Input*: Realisasi Anggaran Pendapatan

Kriteria Efisiensi menurut Mahsun (2016:179) adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti Efisien
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti Efisien berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak Efisien

## 3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan Bastian, indra. (2006: 280). Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mardiasmo, (2018: 134)



Rasio Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam berusaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atau manfaat program yang diinginkan yang telah ditentukan oleh undang-undang atau badan berwenang lainnya, efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan, jika entitas yang diperiksa memenuhi dengan hukum dan peraturan. Panggilan yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pendapatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Outcome*: Realisasi Anggaran Pendapatan

*Output*: Target Anggaran Pendapatan

Kriteria Ekonomis menurut Mardiasmo, (2018: 134) adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak Efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti Efektif berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti Efektif.

Dari uraian ketiga elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) ekonomis terkait dengan *input*, (2) efisiensi terkait dengan *input* dan *output*, dan (3) efektivitas terkait dengan *output* dan tujuan.

Penerapan konsep *value for money* dalam mengukur kinerja pada organisasi sektor publik tentunya menawarkan keuntungan bagi organisasi itu sendiri maupun bagi masyarakat. Manfaat yang diinginkan dari penerapan *value for money* dalam organisasi sektor publik adalah: ekonomis (rajin) dalam mencari dan mengalokasikan sumber daya, efisien (efisien) dalam menggunakan sumber daya, dan efektif (efektif) dalam mencapai tujuan dan sasaran. Mardiasmo (2018 :130)

Manfaat lain dari implementasi konsep *value for money* yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaa akuntabilitas publik. Mardiasmo (2018: 7).

Dari berbagai keunggulan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for money* dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik sangat bermanfaat bagi suatu instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat secara tepat dan tepat sasaran sehingga tercipta kualitas layanan yang baik dengan menggunakan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

### **3. Konsep *Value for money* pada pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan 4 pendekatan, yaitu analisis anggaran, analisis rasio laporan keuangan, *blanced scorecard method*, dan pengukuran *value for money*. *Value for money* adalah inti pengukuran pada organisasi pemerintah yang mempunyai tiga konsep, dalam pengembangan indikator kinerja yang bisa mengukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Sehingga *value for money* sangat penting untuk menilai tingkat kinerja dalam pemerintah. Mahsun (2016)

*Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas, menyatakan bahwa pengukuran *output* harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ditujukan ke bidang kinerja sesungguhnya, yaitu berupa *output* yang benar-benar menunjukkan kinerja yang diharapkan.
2. Tepat sasaran, dalam artian tidak hanya mencerminkan estimasi kasar.

3. Tepat waktu, objektif, dalam artian tidak dapat dimanipulasi.

*Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Halim (2002), menyatakan bahwa konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomis, efektivitas, efisiensi kinerja program, dan kegiatan organisasi. Konsep *value for money* (VFM) adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. *Value for money* juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap nilai rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Penilaian kinerja berdasarkan *value for money* menurut Mahmudi (2018:81) adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Karena pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Negara harus bertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan.

Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan dana publik apakah telah memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Penilaian kinerja berdasarkan *value for money* dibangun atas tiga komponen utama. Mahmudi, (2018:93) yaitu sebagai berikut:

1. Komponen misi, visi, tujuan, sasaran dan target.
2. Komponen *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
3. Komponen pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

#### 4. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis yang dihasilkan dari kegiatan atau operasi entitas pemerintah selama satu periode yang menghasilkan peningkatan ekuitas, bukan dari pinjaman yang harus dibayar Kembali, Bastian, Indra. (2006). Laporan laba maupun rugi menurut Halim (2002) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah hasil dari semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomis asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 2) Dana Perimbangan Merupakan dana yang berasal dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang meliputi bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil pajak dan bantuan keuntungan dari provinsi.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Merupakan pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan seperti bantuan dana penyeimbangan dari pemerintah dan dana darurat.

*Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penjelasan dari masing-masing elemen sebagai berikut:

- 1) Ekonomis adalah pemerolehan sumber daya (*input*) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- 2) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisien merupakan perbandingan *output* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- 3) Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan.

## 5. Pengertian Belanja atau Biaya

Beban atau biaya ialah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potential selama satu periode dalam bentuk arus kas keluar, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat penurunan aset bersih atau ekuitas, tidak termasuk yang berkaitan dengan distribusi ke ekonomis terkait individu itu sendiri. Bastian, Indra. (2006). Upaya dan kejelasan biaya menurut Halim (2002) adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi atau Rutin dan Pemeliharaan Merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik yang meliputi belanja pegawai atau bersifat personal, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.
- 2) Belanja modal atau investasi pembangunan merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah pengeluaran rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok pengeluaran administrasi umum seperti biaya modal tanah, biaya modal jalan maupun jembatan, biaya modal peralatan kantor dan biaya rumah tangga.
- 3) Belanja Administrasi Umum ialah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak ada hubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain biasa disebut dengan biaya tetap pegawai.
- 4) Belanja Pegawai atau Personalia Merupakan belanja pemerintah daerah untuk orang atau personil yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai seperti biaya gaji dan tunjangan pegawai, biaya perawatan dan pengobatan, biaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5) Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa seperti biaya bahan pakai habis kantor, biaya makanan maupun minuman kantor, dan biaya penyusutan gedung.
- 6) Belanja Perjalanan Dinas Merupakan belanja pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan seperti biaya perjalanan dinas, biaya

perjalanan pindah, biaya pemulangan pegawai yang gugur dan dipensiunkan.

- 7) Belanja Pemeliharaan Merupakan belanja pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah seperti biaya pemeliharaan bangunan gedung, biaya pemeliharaan jalan maupun biaya jembatan, biaya pemeliharaan hewan dan ternak serta tanaman yang ada.
- 8) Belanja Transfer Merupakan pemerintah daerah untuk kegiatan amal tanpa mengharapkan adanya pengembalian atau imbalan seperti anggaran pinjam, dana bantuan, dana cadangan.

